

Ketidakamanan Manusia Pasca Pandemi Covid-19: Studi Kasus Indonesia

**Syasya Yuania Fadila Mas'udi
Fajar Alamsyah**

*Department of International Relations
University of Muhammadiyah Malang*

email: syasyamasudi@umm.ac.id

ABSTRACT

Indonesia as a developing country has many problems that cause human insecurity, such as for example the lack of adequate health facilities, especially in areas outside Java, environmental problems such as plastic pollution in the oceans which indirectly also has a negative impact on health, as well as some difficulties in economic growth. The state of insecurity felt by the Indonesian people got worse when the Covid-19 pandemic hit Indonesia, this is evidenced by the many fatalities and increasing unemployment due to the pandemic. After about two years of being hit by a pandemic, Indonesia is currently entering a post-pandemic year where all sectors have recovered, especially in these three sectors. This research wants to see whether the Indonesian people are still facing insecurity in the health, environment and economic sectors after the Covid-19 pandemic. The results of the study found that even though Indonesia has started to rise, the legacy of insecurity, especially in these three sectors, is still being felt by the majority of Indonesian people. This is evidenced that in the health sector, improvements in health facilities are still not optimal, in the environmental sector, the Indonesian people are actually facing a new pollution problem, namely mask pollution, and in the economic sector, the number of unemployed people who increased during the pandemic has not been fully employed.

Keywords: *human insecurity, economy insecurity, health insecurity, environmental insecurity, Indonesia, post-pandemic Covid-19*

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak masalah yang menyebabkan ketidakamanan manusia, seperti contohnya kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai terutama di daerah luar Jawa, masalah lingkungan seperti pencemaran plastik di lautan yang secara tidak langsung juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang makin sulit. Keadaan insecurity yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia semakin buruk ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya korban jiwa meninggal dan meningkatnya angka pengangguran akibat pandemi tersebut. Setelah sekitar dua tahun dilanda pandemi, saat ini Indonesia memasuki tahun pasca pandemi dimana semua sektor sudah kembali bangkit, khususnya pada tiga sektor tersebut. Penelitian ini ingin melihat apakah masyarakat Indonesia masih menghadapi insecurity dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun Indonesia sudah mulai bangkit, warisan insecurity terutama dalam tiga sektor tersebut masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa dalam bidang kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan masih belum maksimal, dalam bidang lingkungan, masyarakat Indonesia justru menghadapi masalah polusi baru yakni polusi masker, dan dalam bidang ekonomi, jumlah pengangguran yang meningkat selama pandemi belum sepenuhnya terserap kembali dalam dunia kerja.

Kata Kunci: *ketidakamanan ekonomi, ketidakamanan manusia, ketidakamanan kesehatan, ketidakamanan lingkungan, pasca Covid-19*

Pendahuluan

Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai tahun pasca pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan penyebaran virus Covid-19 sudah tidak terlalu masif dan tidak terlalu memakan banyak korban seperti dua tahun sebelumnya. Meskipun virus Covid-19 sendiri belum sepenuhnya hilang dari muka bumi, setidaknya kekuatan varian terbaru dari virus ini sudah semakin melemah. Seperti yang dijelaskan oleh Amin Soebandrio, Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bahwa virus Corona semakin melemah akibat seringnya bermutasi. (CNN, 2022) Sehingga kemudian banyak negara yang memutuskan untuk melonggarkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan masker dan *social distancing*, termasuk berkegiatan dan berkumpul di tempat publik. Indonesia adalah salah satu negara yang mulai melonggarkan kebijakan tersebut. Di Indonesia pelonggaran-pelonggaran ini sudah mulai dilakukan sekitar pertengahan tahun 2022 (CNBC, 2022).

Indonesia adalah satu dari hampir seluruh negara di dunia ini yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan data laporan dari WHO yang dikutip oleh BBC, Indonesia menempati posisi ketiga selama tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah kematian tertinggi, di atas Amerika Serikat (BBC, 2022). Pandemi yang terjadi kurang lebih selama 2 tahun ini menyebabkan *human insecurity* setidaknya dalam 3 bidang, yakni kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui, dalam sektor ekonomi, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif yang mengakibatkan naiknya jumlah pengangguran dan penduduk miskin selama pandemi. Pandemi tidak hanya menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, namun juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan mata pencahariannya selama pandemi. Demikian juga dalam hal kesehatan. Selama pandemi Covid-19 Indonesia tidak hanya kehilangan nyawa banyak penduduknya akibat tidak mumpuninya sarana dan prasarana kesehatan yang ada, tetapi juga kehilangan banyak tenaga kesehatan dan tenaga medis, terhitung lebih dari 100 orang. Dan dalam bidang lingkungan, sampah masker tentu menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan kita yang memang sudah memiliki masalah pencemaran sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk bisa melihat apakah masih ada “warisan” pandemi yang dialami oleh masyarakat Indonesia terutama dalam 3 hal tersebut, yakni *economy, health, dan environmental insecurities*.

Kajian Teori

Human Security

Konsep *Human Security* bukanlah konsep baru dalam studi hubungan internasional. *Human Security* sendiri dikaji secara luas dalam mencakup isu-isu non-militer dan sudah dikembangkan ke dalam konsep keamanan komprehensif. Sejarah historis dan substansial, konsep *human security* sudah mengalami banyak perkembangan semenjak berdirinya Palang Merah Internasional (*Internasional Red Cross*) yang berdiri pada tahun 1945 yang diikuti dengan berdirinya “ Deklarasi universal Hak-hak Asasi Manusia yang beridir pada tahun 1948”. *Human security* mencakup beberapa aspek dalam isu arus balik globalisasi yang melahirkan arus balik yang dapat membahayakan negara-negara lemah, kelompok dan individu. dan yang paling menonjol dari perkembangan *Human Security* ialah menguatnya upaya dan gagasan *human security* dalam masalah isu terhadap masalah-masalah keamanan manusia yang tengah terjadi, mulai dari konflik peperangan, perdagangan manusia, kemiskinan, masalah pangan, terorisme, perdangan senjata illegal, kerusakan lingkungan, penyakit menular dan sebagainya.

Salah satu penstudi *Human Security* Barry Buzan, mengemukakan bahwa *human security* berorientasi pada militeristik berubah mencakup menjadi aspek-aspek isu non-tradisional seperti, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, kerentangan pangan, dan HAM.

Sehingga, konsep *Human Security* ini mencangkup ke aspek-aspek dimensi keamanan lingkungan yang menjadi agenda utama dunia saat ini hingga ke aspek keamanan ekonomi, keamanan pangan dan keamanan kesehatan. Setiap ancaman ini saling terkait satu sama lain, yang mana satu ancaman dapat merambat mempengaruhi sector lain (Faisal, Karisma, Har, & Eyenairo, 2012).

Lebih jauh lagi UNDP dalam report 1994 melalui *human development* menjelaskan secara ringkas *human security* dibagi menjadi tujuh aspek kemanan manusia yang menjadi point penting. Pertama, *economic security* yaitu bebas dari kemiskinan dan jaminan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kedua, *food security* yaitu tersedianya kebutuhan pangan dan mudah didapatkan. Ketiga, *health security* yaitu pelayanan akses mendapatkan fasilitas kesehatan dan proteksi dari berbagai macam penyakit berbahaya. Keempat, *environmental security* yaitu terlindung dari polusi udara dan berbagai macam pencemaran lingkungan, serta mudahnya akses dalam mendapatkan air dan udara bersih. Kelima, *personal security* yaitu terbebas dari segala macam ancaman dari perang, kekerasan domestic, criminal dan narkoba. Keenam, *community security* yaitu lestariannya budaya dan identitas kultural. Ketujuh, *political security* yaitu perlindungan terhadap kebebasan berbagai macam tekanan politik dan hak asasi manusia (Human, Framework, Human, & Reports, 2006).

Diperkuat oleh Evans salah satu scholar *Human Security*, menyebutkan bahwa inti dari *Human Security* adalah representasi dari jawaban yang spesifik dalam bidang keamanan untuk siapa, dari apa, dan dengan cara apa. Tentu *Human Security* menimbulkan polemic bagi konsepsi tradisional keamanan nasional dengan memaparkan beberapa ide pokok yang merubah refrensi pokok dan memaparkan isu-isu melampui strategi keamanan tradisional. Secara harfiah, dapat menimbulkan isu yang terbilang sangat dasar seperti berkaitan dengan hati nurani, kewajiban diluar batas, perkembangan dan legitimasi domestic secara politis, menimbulkan pertanyaan persoalan kedaulatan, peran global dan institusi regional dan hubungan negara dengan warganya. Negara yang tidak aman akan menimbulkan masalah bagi negaranya, tetapi yang menjadi persoalan disini ialah negara yang aman belum pasti bisa membuat masyarakatnya aman. Sehingga, dapat di tarik kesimpulan, bahwa Evans menegaskan secara garis besar bahwa point utama dari *Human Security* adalah gagasan dan ide mengenai tanggung jawab untuk melindungi. Menurut, Evans *human security* memang cukup sulit dijangkau baik secara praktik maupun teori dalam hubungan internasional. Sehingga adanya kemungkinan terjadinya pergeseran dari akibat benturan suatu konsepsi dimana ia diterapkan (Evans, 2004). Hal ini diperkuat dengan gagasan apa yang tertera di jurnal yang berjudul *Human Security: East versus West* yang di kutip melalui gagasan Acharya yang mengemukakan bahwa dalam konsep keamanan, seperti *human security* ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan muncul secara evolutif melalui berbagai macam pergeseran yang semula dari *national security*, menjadi *comprehensive security*, menjadi *cooperative security* dan saat ini bergeser menjadi *human security* (Hama, 2017).

Pembahasan

Bidang Kesehatan

Sebelum adanya pandemi fasilitas kesehatan di Indonesia mengalami banyak problematika, baik dari fasilitas hingga jumlah tenaga medis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas tenaga medis dengan membentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dalam program ini, menempatkan Dokter Layanan Primer (DLP) yang perannya sangat penting dalam pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas. Namun, masih banyak dokter yang belum kompeten sehingga layanan JKN tidak optimal. Berdasarkan data dari Permenkes RI No. 75 tahun 2015, bahwa puskesmas

dalam prosedurnya diuntut memenuhi 155 jenis penyakit, dengan begitu setiap warga yang berobat tidak perlu ke rumah sakit. Namun, Survei yang dilakukan oleh Direktur Kebijakan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda pada tahun 2019 45% Puskesmas di Indonesia tidak mendapatkan pelatihan, pengendalian dan pencegahan infeksi. Bahkan, ada 17% Puskesmas yang tidak tersedia akses listrik 24 jam. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) bahwa pada tahun 2016 dari total 9.742 puskesmas, terdapat 16.677 dokter umum. Dari data tersebut bisa dihitung jumlah dokter di setiap puskesmas memiliki 1,73 dokter. Dalam hal tersebut juga masih banyak provinsi yang puskesmasnya minim dokter seperti di NTT 317 dokter umum untuk 370 puskesmas, Sulawesi Tenggara 245 dokter umum untuk 269 puskesmas, Sulawesi Barat 82 dokter umum untuk 94 Puskesmas, Maluku 153 dokter untuk 199 unit Puskesmas, Papua Barat 79 dokter umum untuk 149 unit puskesmas dan daerah lainnya masih banyak akan kekurangan dokter (Sosial, Upaya, & Kompetensi, 2016). Hal ini sejalan dengan data Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2015. Menunjukkan ada 38,53% Puskesmas yang terdapat dokter melebihi prosedur, 35,9% Puskesmas yang cukup dokter, dan terdapat 25,57% Puskesmas yang masih kekurangan Dokter. Hal ini tidak terlepas dari lembaga pendidikan di Indonesia, banyak perguruan tinggi di nilai masih belum maksimal untuk mengedukasi para calon dokter dan tenaga medis. Data dari ketua Umum PB IDI Oetama Marsis, menyebutkan bahwa pada tahun 2015 dari 60 dari 75 Fakultas Kedokteran di Indonesia masih berada pada akreditasi B dan C, sehingga banyak dokter yang perlu diuji lagi sesuai dengan kompetensi dokter Indonesia.

Pemerintah menyumbang APBN Untuk fasilitas kesehatan di Indonesia hanya mendapatkan 3% dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan terbagi untuk setiap pemerintah daerah, jika di dibandingkan dari negara lain Indonesia paling rendah dalam Layanan kesehatan dalam APBN, total anggaran kesehatan dalam APBN pada tahun 2021 terjadi penurunan dari 212,5 triliun pada 2020 menjadi 169,7 triliun pada tahun 2021. Di sisi lain, APBN untuk infrastruktur mengalami kenaikan, hal tersebut sangat fatal bagaimana kesehatan menjadi nomor dua (Hidayatullah, 2020).

Data tersebut menunjukan betapa masih kurangnya perhatian pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan dan lemahnya fasilitas serta sulitnya penyediaan fasilitas kesehatan yang merata untuk masyarakat. Terutama untuk daerah-daerah pelosok Indonesia, kurangnya pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan lanjutan. Ada 62.9% dari total populasi masyarakat Indonesia kekurangan akses ke rumah sakit dan 60.8% kekurangan akses fasilitas layanan kesehatan primer. Kalaupun, fasilitas kesehatan tersedia, sebagian besar layanan kesehatan primer tidak tersedia dokter, seperti di daerah timur Indonesia Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan NTT. Berikut sejumlah rasio perbandingan jumlah dokter dengan pasien, 1 dokter di Jakarta bisa melayani 350 orang, di Maluku dan Papua 1 dokter bisa melayani 4000 orang, lebih jelasnya 27.000 dokter di Jakarta terdaftar untuk melayani 10.3 juta orang, sedangkan di Maluku dan Papua kurang lebih 1.700 dokter terdaftar untuk melayani 6,5 juta orang (doctorshare, 2020).

Jika kita melihat bagaimana fasilitas dan tenaga medis di Indonesia sebelum pandemi banyak mengalami problematika. Ketika pandemi telah merebak di Indonesia, *health insecurity* semakin jelas, dimana *health security* adalah tersedianya berbagai bentuk fasilitas kesehatan dan terbebas dari penyakit berbahaya. Adanya Covid 19 masuk ke Indonesia, semakin memperjelas buruknya layanan dan fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga medis menjadi permasalahan yang mengintai masyarakat Indonesia selama Covid 19. *Health insecurity* di Indonesia telah ada hadir sebelum ada Covid 19, dimana masih minimnya fasilitas kesehatan di berbagai pelosok negeri dan tenaga media tidak merata, sehingga Covid 19 semakin memperjelas adanya *health insecurity* yang telah lama mengintai masyarakat Indonesia.

Selama pandemi, banyak rumah sakit di Indonesia membatasi sejumlah pasien yang berobat akibat melonjaknya jumlah korban akibat penyebaran virus Covid-19. Jatuhnya tenaga medis akibat dari *Burnout Syndrome* menjadi permasalahan baru dan tidak sedikit tenaga medis gagal tugas yakni mati akibat kelelahan maupun tertular Covid-19. Hal ini sejalan dengan data di atas sebelum adanya pandemi tenaga medis Indonesia masih minim dan tidak sedikit dokter yang tidak kompeten yang berasal dari pendidikan terakreditasi rendah. Tidak heran ketika Covid-19 menerpa Indonesia secara fasilitas dan infrastruktur Indonesia masih lemah, pada tahun 2021 menyebabkan lebih dari 180 Nakes meninggal dunia saat menjalankan tugas (Rahajeng, 2021) Selain dari aspek keselamatan dan perlindungan dari infeksi Covid-19 (Akhsanu, 2021). sedikitnya jumlah Nakes di Indonesia menjadi persoalan, karena ketidakseimbangan antara korban dan Nakes menjadi permasalahan baru yang di hadapi. Nakes yang berkaitan dengan pernapasan masih menjadi keterbatasan setiap rumah sakit, karena jumlahnya yang sedikit. Indonesia di tengah pandemi per 4 Mei tahun 2020 melakukan pelatihan pada 11.192 dokter dan perawat non paru demi untuk menutupi keterbatasan tenaga medis dalam menanggapi pasien Covid 19. Adanya keterbatasan jumlah Nakes di Indonesia banyak korban Covid 19 di rumahkan tanpa di rujuk ke rumah sakit. Seperti yang terjadi di Jabodetabek, 100% ICU di RS telah penuh dan tidak sedikit mendapat laporan dari lapangan bahwa pasien Covid 19 yang gejalanya berat tidak mendapatkan perawatan dan berakhir meninggal (Listyani, 2020). Keletihan dan kematian tenaga kesehatan yang cukup signifikan serta kurangnya fasilitas kesehatan di Indonesia menyebabkan tingkat kematian terus melonjak naik baik korban dari masyarakat maupun Nakes.

Merujuk pada UUD Indonesia 1945, yang tercantum pada Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan (mkri.id, 2015). Namun, ketika pandemi menerpa Indonesia sejumlah fasilitas kesehatan tidak mampu menjamin pelayanan kesehatan warganya, sejumlah masyarakat kebingungan dikarenakan "dipingpong" dari satu faskes ke faskes lainnya. Hal menunjukkan fasilitas kesehatan di Indonesia belum mampu menangani seluruh penduduk Indonesia in case kasus seperti pandemi ini terjadi. Ketidaktersediaan layanan fasilitas kesehatan mengakibatkan hak atas kesehatan sejumlah masyarakat tidak terpenuhi dan sampai mengancam nyawa. Berbagai macam persoalan sistematis yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan terbukti tidak siap untuk menghadapi pandemi, dengan total populasi 260 juta manusia, Indonesia hanya memiliki 321.544 ruangan yang berfasilitas tempat tidur di rumah sakit. Artinya 12 tempat tidur tersedia bagi 10,000 orang. Selain dari fasilitas infrastruktur kesehatan, perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap tenaga kesehatan sangat memprihatinkan (Lokataru Foundation, 2020). Banyak tenaga kesehatan mempertaruhkan nyawa dikarenakan minimnya APD, terbukti dengan banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran, hal ini telah memberikan teguran yang sangat keras bagi pemerintah Indonesia yang telah menyelisihi peraturan Menteri Kesehatan No 27 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas pelayanan kesehatan, tercantum bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi diadakan dengan tujuan segenap untuk melindungi keselamatan pekerja, pasien, pengunjung serta masyarakat (Peraturan.bpk, 2017).

Lemahnya layanan kesehatan tidak lepas dari ketidak objektifitasnya pemerintah dalam menerapkan kebijakan, terbatasnya pelayanan kesehatan dan kurangnya tenaga medis serta banyak korban menjadi pelajaran untuk pemerintah Indonesia selama pandemi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mencoba memperbaiki dan memperkuat layanan kesehatan dengan menyiapkan segala bentuk antisipasi terutama terkait pelayanan rumah sakit seperti tempat tidur, obat-obatan dan layanan kesehatan lainnya. Menteri kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah menyediakan 390 ribu tempat tidur dan 70 ribu di antaranya di pergunakan untuk tempat tidur isolasi, dan fasilitas tempat tidur di Intensive Care Unit ada sebanyak 22 ribu pada 23 Januari, 2022. Selain itu, pemerintah Indonesia

sadar bahwa layanan kesehatan primer yakni Puskesmas harus di perkuat sebagai layanan kesehatan garda pertama. pemerintah dalam menguatkan pelayanan kesehatan, dengan meningkatkan akses baik pemenuhan tenaga kesehatan dan peningkatan pelayanan primer seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktek mandiri serta pemenuhan pendukung seperti alat kesehatan dan obat (Rokom, 2022).

Selain itu, pemerintah terus memperkuat upaya untuk mencegah penularan covid 19 melalui peningkatan layanan kesehatan, seperti penguatan testing, treatment dan tracing guna meminimalisir perluasan covid 19. Menjaga tersedianya layanan di rumah sakit seperti tempat tidur tetap berada di angka optimal dan selalu siap siaga merawat pasien. Pemerintah Indonesia juga berusaha keras untuk mencegah dan mengantisipasi pandemi varian baru dengan melakukan vaksinasi terutama pada lansia dan anak - anak. Terbukti vaksinasi sangat ampuh dalam menekan penularan dan pencegahan Covid 19. Data dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) melaporkan pada tahun 2021, bahwa Vaksin Covid 19 telah berhasil mencegah setidaknya 330.00 kematian dan penggunaan vaksin mengurangi kasus rawat inap. Tenaga Kesehatan menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan Covid 19, atas dasar itulah kementerian Kesehatan memprioritaskan Nakes untuk di vaksinasi Covid 19. Efikasi vaksin terbukti dilakukan pada tahap 2 di Bandung menunjukkan vaksinasi efektif mencegah infeksi Covid 19 sebesar 65,3% (KEMKES, 2557). Data menunjukkan bahwa efikasi vaksin Sinovac, orang yang mendapatkan vaksin Sinovac menurunkan resiko terinfeksi Covid 19 berkurang sebesar 65,3% di bandingkan dengan orang yang tidak melakukan vaksinasi. Efikasi Pfizer 95%, orang yang mendapatkan vaksin Pfizer resiko tertular Covid 19 berkurang 95% dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan vaksinasi (MARWAN, 2021).

Untuk mencegah kejadian kurangnya fasilitas kesehatan seperti oksigen, pemerintah berkerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah lain, kemudian kementerian kesehatan juga membangun 36 generator oksigen, dimana 20 di antaranta telah terinstalasi di berbagai provinsi dan pemerintah bertekad akan terus menambah jumlahnya. untuk menutupi kekurangan tenaga kesehatan dalam kondisi mendatang, pemerintah telah menyiapkan fasilitas kesehatan melalui pengaturan SDM (Humas, 2021).

Bidang Lingkungan

Isu sampah di Indonesia telah menjadi hal yang lumrah, dimana pencemaran sampah telah banyak meninggalkan efek negatif bagi lingkungan. Di kutip data dari *Making Oceans Plastic Free* pada tahun 2017 bahwa setiap tahunnya di Indonesia menghasilkan rata-rata 182,7 miliar volume sampah berjenis plastik digunakan setiap tahunnya, yang artinya bobot total sampah berupa plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton pertahun. Di akumulasikan, jika rata-rata berat badan seseorang memiliki 60 kg, maka bisa dikatakan berat sampah plastik setiap tahunnya sama dengan sebanding dengan berat badan 21.315.000 orang. Sampah plastik banyak memberi efek negatif pada lingkungan di Indonesia dan banyak berakhir di lautan ada sekitar 40% dari seluruh total sampah plastik di Indonesia berakhir di lautan (Jabarprov, 2019).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, sampah plastik di Indonesia telah mencapai 64 juta ton setiap tahunnya. Ada sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik yang berakhir ke lautan. Sementara itu, kantong plastik yang berakhir ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar pertahun atau 85.000 ton plastik. Survei yang dilakukan oleh Geotimes pada tahun 2016 menemukan bahwa sampah yang berada di Jakarta mencapai 6.500 ton per hari dan 13% dari sampah tersebut merupakan sampah plastik. Di Bali sampah mencapai 10.725 ton perhari, di Palembang, angka sampahnya naik signifikan dari sebesar 700 ton per hari menjadi 1.200 ton perhari. Jumlah sampah yang terus naik di sejumlah daerah di Indonesia

menjadikan Indonesia sebagai negara urutan kedua sebagai pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok (Berplastik, 2021).

Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan, selain sampah plastik mayoritas sampah di Indonesia berasal aktivitas rumah tangga ada sekitar 67,8 ton sampah rumah tangga pada tahun 2020. 16,4% dari sampah tradisional, 7,29% sampah dari perniagaan, 39,8% sampah dari sisa makanan, 14,01% dari sampah berupa kayu dan ranting, 12,02% dari sampah kertas dan 3,34% sampah logam. Dari semua jenis sampah di Indonesia hanya berhasil dikelola sebesar 55,87% setiap tahunnya dan sisanya ada sebesar 44,13% sampah masih tersisa dan berakhir begitu saja (Ayu, 2021).

Pada tahun 2017 data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menemukan bahwa 80% sampah laut berasal dari daratan yang di sebabkan dari ketidak profesionalnya pengelolaan sampah hingga banyak berakhir di sungai. Adapun jenis sampah tersebut berupa kaca, logam dan peralatan lainnya, sisanya sampah ringan yang mengapung seperti sampah plastik, dari data yang sama sampah plastik telah banyak membunuh 100.000 mamalia laut dan dua juga burung laut di setiap tahunnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Hasanudin dan University California, hasil investigasi menemukan ada 25% ikan yang beredar di pasar kota makasar banyak mengandung plastik (Lingkungan, 2017).

Pada tahun 2017 data dari *Making Oceans Plastic Free*, menyebutkan rata - rata ada 182,7 miliar plastik yang digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, total bobot sampah kantong plastik yang ada di Indonesia mencapai sebesar 1.278.900 ton pertahunnya. Berat sampah kantong plastik pertahunnya di Indonesia jika di kalkulasikan dengan berat badan rata-rata seseorang 60 kg, maka berat sampah plastik di Indonesia pertahunnya sama dengan berat badan 21.315.000 orang. Pada data yang sama, ada sekitar 40% sampah plastik mendominasi dari keseluruhan limbah di Indonesia. Per tahunnya, 511.560 ton sampah plastik setiap tahunnya berakhir di laut. Hal ini semakin di perburuk, dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia yang mengimpor sampah dari negara-negara lain pada tahun 2018 yang mencapai 320 ton atau naik sebesar 150% dari tahun sebelumnya. Dampak dari kenaikan sampah di Indonesia semakin terlihat dan kualitas lingkungan hidup menjadi terancam. Badan pusat statistik dan data statistik perdagangan komoditas PBB (UN Comtrade) menyebutkan bahwa volume sampah di Indonesia mengalami peningkatan lebih dua kali lipat dari semula 124.000 ton pada tahun 2013 silam menjadi 283.000 ton pada tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari kenaikan sampah impor dari negara lain termasuk juga sampah hasil selundupan semakin memperburuk kondisi lingkungan Indonesia pada tahun 2018. Sungai tercemar hasil dari buangan limbah kertas di Jawa timur ke sungai berantas, berdasarkan hasil investigasi penelitian ICH pada tahun 2019, pada bulan oktober tahun 2018 sampai maret 2018 lokasi hilir sungai berantas dan kali Surabaya, ditemukan partikel yang mengandung mikroplastik yang terkandung dalam air sebanyak 2.499 partikel/liter (Novaradila, Ali, Astin, Aryani, & Purwanto, 2020).

Berdasarkan data dari badan Statistik Indonesia pada tahun 2019, menjelaskan sampah berjenis organik, anorganik dan sampah B3 di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya di setiap kota - kota di Indonesia. (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, 2019) Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan tentang pengelolaan sampah pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020 yang berbicara tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Semestinya berdasarkan pasal 1, pp no 18 tahun 2020 harus melalui proses penampungan sementara (TPS) kemudian lanjut ke pengolahan sampah terpadu dengan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) . Selanjutnya sampah berakhir di TPA. Namun, sebagian sampah di Indonesia tidak melalui proses tersebut, banyak sampah berakhir dengan sistem open dumping, dimana sistem ini memicu pencemaran lingkungan seperti tercemarnya air, tanah dan udara (Jogloabang, 2020).

Masuknya Pandemi Covid-19 jumlah sampah di Indonesia masih tidak berkurang justru mengalami penambahan jenis sampah. Penggunaan berbahan sampah plastic selama pandemic mengalami kenaikan, Jumlah produksi sampah medis di sejumlah fasilitas layanan kesehatan mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data dari kementerian PPN/Bappenas menemukan bahwa potensi peningkatan timbunan berupa sampah medis hasil dari penggunaan alat pelindung diri (APD) mengalami kenaikan sampai 3 hingga 4 kali lipat (Kemenkopmk, 2021).

Selama di masa pandemi, sampah medis berbahaya mengalami kenaikan masal hingga mencapai 20 ribu Ton. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak maret tahun 2020 hingga agustus tahun 2021 sampah medis telah berada pada volume 20.110,585 ton metrik per kubik. Sampah medis tersebut berupa hasil dari fasilitas kesehatan, pusat isolasi, vaksinasi dan rumah tangga. Sangat disayangkan berdasarkan data dari KLHK bahwa hanya ada 122 rumah sakit yang memiliki alat pengelolaan sampah berizin (CNN, 2021).

Kalkulasi jumlah sampah medis berdasarkan dari 34 provinsi di Indonesia, pemerintah memutuskan membuang sampah medis tanpa diproses di TPA untuk menghindari sumber penularan akhirnya banyak sampah medis berakhir sembarangan. Berdasarkan data dari KLKH, Rosa Vivien Ratnawati menyebutkan bahwa dari data 34 kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2020, DKI jakarta sebagai daerah penyumbang sampah medis terbanyak sebesar 337,16 ton. Setelah itu di ikuti oleh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Banten. Hal ini tidak lepas dari lemahnya alat insinerator di rumah sakit setiap provinsi. Selain itu juga pengelolaan limbah di setiap daerah masih terbatas. Oleh karena itu, melalui kebijakan KLKH melalui ederan surat menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah Infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan Corona Virus Desease. Hal ini di harapkan mampu mengatasi pencemaran sampah medis (Jogloabang, 2020),

Lemahnya system pengeloaan sampah di setiap daerah menyebabkan banyak sampah medis berakhir di terbuka seperti pembakaran, sungai dan laut. Seperti, Alat uji bekas dan botol vaksin bekas dari bekas pandemi Covid 19 menumpuk hingga puluhan ribu ton yang dapat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. KLKH pada Bulan Desember 2020 mencatat, bahwa APD, jarum suntik, Masker, sarung tangan medis dan lain lain telah mencampai jumlah yang fantastis yang berada di kisaran 296 ton sampah medis setiap harinya yang di hasilkan dari 2.852 rumah sakit, 9099 Puskesmas, dan 8.841 Klinik, dimana sampah medis tersebut sebagian besar bermuara di lautan. Setelah pandemi menghantam Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan riset tentang sampah khususnya sampah plastik, hasil investigasi di temukan mayoritas selama pandemi sampah plastik banyak di temukan berupa sampah medis. Ada tujuh tipe dari 19 katagori sampah di sungai Marunda dan Cilincing Jakarta Utara. Hasil investigasi ditemukan dari dua sungai tersebut, sampah yang berakhir di sungai bermuara ke teluk Laut jawa, adapun jenis sampah tersebut seperti Alat pelindung diri (APD), masker medis, sarung tangan, pelindung wajah dan jas hujan (Rianda, 2022).

Adanya peningkatan sampah medis yang signifikan selama pandemi di Indonesia mengindikasikan besarnya pola perubahan komposisi sampah yang muncul selama pandemi. Ini menegaskan selama dan sesudah pandemi ancaman pencemaran lingkungan akan semakin tinggi setelah pandemi Covid 19 di Indonesia, Hal ini terbukti, setelah berakhir Covid 19 Indonesia, peningkatan produksi masker, hand sanitizer, alat pelindung duri, plastik penyekat, limbah obat Covid 19, sarung tangan karet, fasilitas RS, jarum suntik dan box makanan sekali pakai yang tidak kelola dengan baik menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan. Bukti nyata dari kerusakan lingkungan akibat dari pandemi

Covid 19 adalah dengan melonjak naiknya sampah B3 termasuk di dalamnya sampah padat berupa masker, APD dan alat lain lainnya (Mulyadi, 2021).

Banyak sampah tersebut di jumpai masuk ke TPA, data dari KLKH menyebutkan ada 30-50% sampah medis masuk ke TPA. Selain itu, banyak sampah medis berupa masker, sarung tangan sekali pakai telah mencemari lautan ada sekitar 28.000 ton sampah plastik berupa masker dan sarung tangan di jumpai di lautan Indonesia. Seperti yang di jumpai di Dusun Selogiri Banyuwangi, sampah kemasan rapid antigen banyak berkahir mengapung di pantai Dusun Selogiri Banyuwangi Indonesia. Selain kemasan rapid antigen, sampah masker, sarung tangan sekali pakai, hingga surat keterangan hasil rapid antigen juga di temukan di sepanjang laut. Di selat bali juga di temukan sampah bungkus antigen (Ferdinan, 2022).

Limbah medis yang tidak kelola dan dibuang tidak sesuai aturan, banyak berakhir di muara sungai. Hal ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut. Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebanyak 46-57% sampah medis selama pandemi berakhir ditemukan di muara sungai. Seperti sarung tangan, APD, hazmat, jas hujan dan face shield (Iman, 2021). Berdasarkan catatan dari satgas Covid-19, ditemukan sebanyak 1,94 kg sampah medis berupa masker di Muara Clincing pada bulan maret lalu, dan sampah tersebut selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Begitu juga di Muara Marunda, masker bekas banyak berserakan. Ditemukan sebanyak 2,29kg pada bulan maret dan mengalami kenaikan pada bulan april menjadi 6,28 tahun 2020 (Kukuh, 2022).

Bidang Ekonomi

Perekonomian suatu negara dapat mengalami perubahan dalam berbagai faktor, seperti perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, adanya pandemi dan perang antara Rusia dan Ukraina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari hal tersebut, dimana penulis akan mengkajinya dari tahun 2017 untuk melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data dari Badan Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia pada sepanjang tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sejak 2014 silam. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan Indonesia pada awal pemerintahan Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla berada pada 5,02%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 4,79%, di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,03% dan di tahun 2017 menjadi 5,07%. Kepala BPS DR (BPS, 2018) Suhariyanto menyebutkan, bahwa sektor lapangan usaha jasa, dengan informasi dan komunikasi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 9,81% , diikuti oleh jasa lainnya sebesar 8,6% dan transportasi dan pergudangan sebesar 8,49%. Pada tahun 2017 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai 13.588,8 triliun dan PDB perkapita menginjak 51,89 juta setara dengan U\$3.876,8. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2017 yang mengalami kenaikan 1,70% dari sektor produksi hal ini di picu oleh efek musiman pada lapangan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengalami kontraksi sebesar 21,60% . Dari sisi pengeluaran yang disebabkan oleh turunnya Ekspor neto (Kominfo, 2018b).

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami pemulihan pada tahun 2018. Perekonomian Indonesia yang diukur melalui Produk Domestik Bruto dari dasar harga berlaku mencapai Rp14 837,4 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp56,0 juta atau setara dengan U\$3927,0. Pemulihan perekonomian Indonesia terus naik pada tahun 2018 sebesar 5,17% jika di bandingkan dengan tahun 2017 yang menginjak 5,07%. Di tinjau dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan Usaha jasa lainnya sebesar 8,99%. Dari segi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi di komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08% (Badan Pusat Statistik, 2019). Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari meluasnya lapangan kerja, melalui data Badan Statistik, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan

bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2017 turun sebesar 5,34%, di ikuti tingkat kemiskinan turun menjadi 9,82% (Kominfo, 2018a).

Pada tahun 2019, di tengah ketidakpastian Global perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh yang secara kumulatif berdasarkan lapangan usaha tumbuh sebesar 5,02%. Lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 10,55%, diikuti jasa perusahaan 10,25% dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Untuk struktur PDB pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan berarti dari tahun sebelumnya yang berada pada Rp15 833,9 triliun dan PDB perkapita mencapai 59,1 Juta setara dengan U\$4 174,9(Kominfo, 2019). Penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar berada pada sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang menyumbang senilai 19,70%, kemudian diikuti dengan sektor perdagangan Besar - Eceran, Reparasi Mobil hingga sepeda motor sebesar 13,01%, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebesar 12,72%, dan konstruksi sebesar 10,75% (Statistik, BPS, Statistic Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, & BPS, 2020).

Pada awal tahun 2020 Bank Dunia sebelumnya telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sedikit mencapai 5,1% jika di dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Namun, pada triwulan I 2020 pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka penurunan, hal ini tidak lepas dengan apa yang tengah terjadi di dunia yakni Covid-19 yang menyebar luas. Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal maret 2020. Angka korban tertular setiap harinya terus bertambah hingga menyebabkan penurunan pada sektor ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,07%. Bisa di lihat berdasarkan Produk Domestik Bruto terjadi penurunan jika di dibandingkan di tahun 2019 yang menjadi Rp 15,434,2 Triliun dan PDB perkapita menjadi Rp55,9 juta atau setara dengan U\$4.911,7. Di tinjau dari sisi produksi yang paling berdampak terjadi kontraksi pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04%. Sementara dalam segi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, komponen barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terparah sebesar 7,70%. Pada kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Penurunan ekonomi Indonesia tidak lepas dari pandemi yang menerpa seluruh negara di dunia yang menyebabkan perekonomian dunia melemah sehingga berdampak pada penurunan kinerja ekspor Indonesia (BPS, 2021a).

Pada triwulan III 2020 terjadi pertumbuhan negatif jika di dibandingkan dengan triwulan III 2019 sebesar 3,49%. Di lihat dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,70%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 10,82%.(BPS, 2019) Pada triwulan IV 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% jika di dibandingkan pada tahun 2018. Di tinjau melalui PDB produksi, terjadi kontraksi pertumbuhan terdalam masih pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04% (BPS, 2021b).

Dampak ekonomi sangat terlihat akibat Covid-19 yang menerpa Indonesia, dari dampak penurunan ekonomi meningkatnya angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan adanya PHK masal selama pandemi Covid-19. Awal jatuhnya ekonomi Indonesia terjadi pada triwulan II 2020, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB di setiap daerah sehingga hal tersebut berdampak pada kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Pada triwulan II juga awal puncak kelesuan ekonomi banyak sektor sektor usaha di tutup demi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Badan Pusat Statistik dalam survei mengatakan bahwa Covid 19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. (Damayanti, 2022).

Dampak dari Covid 19 melemahkan segala sektor terutama ekonomi, melemahnya ekonomi dan juga pada sektor pariwisata sangat terlihat signifikan. Turunnya jumlah pengunjung wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 2,77 juta kunjungan pada periode Januari-April 2020. Turunnya wisman ke Indonesia berdampak pada penyedia jasa hotel, hal itu terlihat pada tahun 2020 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Indonesia mencapai rata-rata 12,6% atau turun sebesar 41,23% jika di bandingkan TPK tahun 2019. Sektor manufaktur juga ikut terdampak yakni keterbatasan bahan baku dan bahan modal. Mayoritas bahan manufaktur berasal dari Tiongkok sedangkan ekonomi Tiongkok pada tahun 2020 tengah mengalami kondisi yang tidak stabil akibat Covid 19.

Berangkat dari hal ini, banyaknya sektor yang terdampak akibat Covid 19 menyebabkan perusahaan melakukan upaya dengan efisiensi biaya pengeluaran tenaga kerja, salah satunya dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kasus PHK yang terjadi selama masa pandemi Covid 19 banyak terjadi pada sektor formal maupun informal. Pada sektor formal banyak dari perusahaan PHK karena lesunya kondisi dunia industri, sehingga melakukan PHK harus dilakukan demi efisiensi. Untuk sektor informal, dampak dari Covid menyebabkan banyak yang kehilangan pekerjaan akibat dari turunnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 bulan April Kementerian Ketenagakerjaan memaparkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada sektor formal berjumlah 241.431 dari 41.236 perusahaan. Sedangkan di sektor informal pekerja yang terkena PHK sebanyak 532.385 dari 31.444 UMKM. Jumlah seluruh total pekerja yang terkena pada tahun 2020 sejumlah 779.816 (Bahitatul, 2020).

Sektor yang paling terdampak akibat dari Covid-19 di Indonesia, di jelaskan oleh ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamandi bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak, diikuti dengan transportasi udara dan laut yang berkaitan dengan logistik, kemudian UMKM (Sandi, 2022). Hasil Survei Badan Pusat Statistik juga mencatat ada 82,85% perusahaan yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi, yang paling terdampak berdasarkan sektornya adalah makanan dan minuman turun sebesar 92,47%. Di ikuti oleh Jasa lainnya sebesar 90,99%, kemudian transportasi pergudangan, konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan (Bayu, 2022).

Adanya Covid - 19 yang melemahkan ekonomi, pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengambil kebijakan *counter-cyclical* dan APBN dijadikan instrumen yang paling efektif untuk mengindari pemburukan ekonomi nasional yang lebih parah. IMF menilai kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi dengan paket kebijakan komprehensif dan terkoordinasi cukup efektif. Namun, kebijakan pemerintah ketika memperbesar belanjanya guna untuk menghindari resesi yang amat dalam, Indonesia harus berhadapan dengan angka defisit yang melebar. Batasan jumlah defisit anggaran belanja Indonesia di atur dalam Undang - Undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, di dalam tersebut batas maksimal defisit negara hanya sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari produk domestik bruto. Namun, adanya Pandemi yang menghantam Indonesia batasan defisit negara melebihi 3% selama masa Covid 19 (Ananda, 2019). Tidak bisa dipungkiri, selama masa pandemi Covid -19 hutang Indonesia terus bertambah, hal tersebut tidak bisa di hindarkan guna menghindari resesi dan untuk memilikikan kondisi Indonesia. Total utang Indonesia pada tahun 2020 akhir November mencapai Rp5,910 Triliun, kenaikan utang terus bertambah, tercatat selama pandemi dari tahun 2020 hingga 2021 naik 10,8% terhadap PDB (Mustami, 2022).

Pada tahun 2022, kondisi pandemi covid 19 di Indonesia mulai terkendali, kasus Covid 19 turun tajam hingga 97%. Kemudian di lihat dari angka perawatan pasien Covid 19 turun hingga 85%, jumlah pasien meninggal pun turun hingga 88% jika di bandingkan saat puncak Omicron. Adanya tren positif ini menjadi titik terang dalam pemulihan ekonomi Indonesia (Kominfo, 2022). Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada

Triwulan II 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,44% berdasarkan produk domestik atas dasar harga berlaku mencapai Rp4 919,9 triliun. Jika di dibandingkan dengan triwulan II 2021, Triwulan II 2022 tumbuh sebesar 5,44%. Dari sisi Produksi, lapangan usaha dan perdagangan mulai bertumbuh sebanyak 21,27% (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada triwulan III 2022 semakin menunjukkan pemulihan tumbuh sebesar 5,72% berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp5,091,2 triliun, triwulan III 2022 dengan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,81%. Jika dibandingkan dengan triwulan III 2021 bertumbuh sebesar 5,72% (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini tidak lepas dari membaik nya kondisi pandemi di Indonesia, pariwisata mulai buka, UMKM tidak di batas lagi, kegiatan impor ekspor mulai jalan dan kegiatan ekonomi lainnya mulai berjalan (Damayanti, 2022).

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia semakin memperburuk kondisi *insecurity* yang telah ada sebelumnya setidaknya pada tiga sektor, yakni kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Warisan ketidakamanan tersebut masih terasa hingga saat ini, pasca pandemi di tahun 2023. Dalam bidang kesehatan, pemulihan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan dan medisnya masih dalam proses, ditambah dengan urgensi kesiapan apabila pandemi seperti kemarin melanda lagi. Dalam bidang lingkungan, sampah masker menjadi masalah baru dalam masalah polusi lingkungan. Sampah masker yang berbahan dasar plastik ini masih membutuhkan penanganan dan solusi yang tepat agar tidak memperparah kondisi lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia. Terakhir, dalam bidang ekonomi, meskipun kondisi perkonomian Indonesia sudah mulai menunjukkan peningkatan, apa yang terjadi selama pandemi kemarin masih belum bisa sepenuhnya dipulihkan, seperti contohnya penyerapan tenaga kerja.

Referensi

- Anonim. (2020). *Jepang Sumbang 145 Juta Dollar Untuk Penanganan Corona Covid-19 di Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.liputan6.com/global/read/4237200/jepang-sumbang-145-juta-dolar-untuk-penanganan-corona-covid-19-di-indonesia> [Accessed 17 Mei 2020].
- ASEAN PATENTSCOPE, 2019. *ASEAN PATENTSCOPE*. [Online] Available at: <http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/patents?9> [Accessed 13 August 2019].
- ASEAN-Japan Centre, 2018. *ASEAN-Japan Centre's Database on Global Value Chains*. [Online] Available at: https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper1/
- ASEAN-Japan Centre, 2019. *Global Value Chains in ASEAN: A Regional Perspective (Revised)*, Tokyo: ASEAN-Japan Centre.
- ASEAN, 2014. *ASEAN Investment Report 2013-2014: FDI Development and Regional Value Chains*, Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Athukorala, P.-C., 2010. Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization. *ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration* 56, 07 April.
- Azanella, Luthfia Ayu. (2020). *Setelah Dua Bulan, Kasus Baru Covid-19 di Korea Selatan Turun Drastis*. [Online] Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/124200765/setelah-dua-bulan-kasus-baru-covid-19-di-korea-selatan-turun-drastis?page=2> [Accessed 17 Mei 2020].

- BBC News Indonesia. (2020). *Virus Corona: "Kemungkinan Covid-19 Tidak Akan Pernah Hilang", kata WHO*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52657058> [Accessed 17 Mei 2020].
- BBC News Indonesia. (2020). *Virus Corona: Peta dan Infografis Terkait Pasien Terinfeksi, Meninggal, dan Sembuh di Indonesia dan Dunia*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113> [Accessed 17 Mei 2020].
- BBC News Indonesia. (2020). *Virus Corona: WHO Peringatkan Pandemi Covid-19 "Meningkat Pesat"*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52013874> [Accessed 17 Mei 2020].
- BBC News. (2020). *Coronavirus Pandemic: Tracking the Global Outbreak*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-51235105> [Accessed 17 Mei 2020].
- CNBC Indonesia. (2020). *Sekjen PBB: Korea Selatan Sangat Sukses Atasi Wabah Covid-19!*. [Online] Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200501150352-4-155715/sekjen-pbb-korea-selatan-sangat-sukses-atasi-wabah-covid-19> [Accessed 17 Mei 2020].
- CNN Indonesia. (2020). *Data Virus Corona di Jepang Disangsikan*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200514132424-113-503319/data-kasus-virus-corona-di-jepang-disangsikan> [Accessed 17 Mei 2020].
- CNN Indonesia. (2020). *Jepang Kirim Hibah Obat Covid 19 Untuk Indonesia Bulan Ini*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200413123021-113-492984/jepang-kirim-hibah-obat-covid-19-untuk-indonesia-bulan-ini> [Accessed 17 Mei 2020].
- Cucinotta, D. dan Vanelli M. (2020). *WHO Declares Covid 19 as a Pandemic*. [Online] Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191675> [Accessed 17 Mei 2020].
- Jakarta Post, 2020a. *Indonesia, Japan commit to 'cooperation' against COVID-19*. [Online] Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/24/indonesia-japan-commit-to-cooperation-against-covid-19.html> [Accessed 13 May 2020].
- Jakarta Post, 2020b. *COVID-19: Indonesia to export PPE to South Korea as compensation for raw materials*. [Online] Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/21/covid-19-indonesia-to-export-ppe-to-south-korea-as-compensation-for-raw-materials.html> [Accessed 13 May 2020].
- Jakarta Post, 2020c. *Test kits arrive as part of Seoul's US\$500k aid for Indonesia's COVID-19 fight*. [Online] Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/25/test-kits-arrive-as-part-of-seouls-us500k-aid-for-indonesias-covid-19-fight.html> [Accessed 13 May 2020].
- Kickbusch, Ilona, et.al. (2007). *Global Health Diplomacy: the Need for New Perspectives, Strategic Approaches and Skills in Global Health. Bulletin of the World Health Organization Vol.85 No.3*. [Online] Available at: <https://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/06-039222/en/Pp.161-244> [Accessed 17 Mei 2020].
- Lancaster, C., 2007. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago: the University of Chicago Press.
- MOFA Japan, 2020a. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (March 27, 2020, 5:29 p.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000774.html [Accessed 13 May 2020].
- MOFA Japan, 2020b. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (April 7, 2020, 11:15 a.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000777.html [Accessed 13 May 2020].
- MOFA Japan, 2020c. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (April 14, 2020, 10:52 a.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000779.html [Accessed 13 May 2020].

- MOFA Japan, 2020d. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (April 28, 2020, 2:47 p.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000787.html [Accessed 13 May 2020].
- MOFA ROK, 2020a. *Outcome of ROK-Indonesia Foreign Ministers' Telephone Conversation on Mar. 3*. [Online] Available at: http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=320994 [Accessed 13 May 2020].
- MOFA ROK, 2020b. *Outcome of ROK-Indonesia Foreign Ministers' Telephone Conversation*. [Online] Available at: http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321032&srchFr=&%3BsrchTo=&%3BsrchWord=&%3BsrchTp=&%3Bmulti_itm_seq=0&%3Bitm_seq_1=0&%3Bitm_seq_2=0&%3Bcompany_cd=&%3Bcompany_nm [Accessed 13 May 2020].
- Neilson, J., Pritchard, B. & Yeung, H. W.-c., 2014. Global value chains and global production networks in the changing international political economy: An introduction. *Review of International Political Economy*, 21(1), pp. 1-8.
- Nugraha, Fajar. (2020). *Jepang Bantu Dana Rp.224 Miliar ke Indonesia Lawan Covid-19*. [Online] Available at: <https://www.medcom.id/internasional/asean/akW5xELN-jepang-bantu-dana-rp224-miliar-ke-indonesia-lawan-covid-19> [Accessed 17 Mei 2020].
- Nugraheny, Dian Erika. (2020). *Korea Selatan Serahkan Bantuan Alat Tes PCR Untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/19051501/korea-selatan-serahkan-bantuan-alat-tes-pcr-untuk-indonesia>
- OECD Development Centre, 2020a. *COVID-19 in Emerging Asia*. [Online] Available at: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-in-emerging-asia-regional-socio-economic-implications-and-policy-priorities-dao8foof/> [Accessed 13 May 2020].
- OECD Development Centre, 2020b. *COVID-19 Crisis Response In ASEAN Member States*. [Online] Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129949-ehsuoqs87y&title=COVID-19-Crisis-Response-in-ASEAN-Member-States [Accessed 13 May 2020].
- Purnama, Basuki Eka. (2020). *Korsel Salurkan Bantuan Covid-19 Untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://mediaindonesia.com/read/detail/302454-korsel-salurkan-bantuan-covid-19-untuk-indonesia>.
- Saputra, Eka Yudha. (2020). *WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi, Apa Maksudnya?*. [Online] Available at: <https://dunia.tempo.co/read/1318511/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-apa-maksudnya/full&view=ok> [Accessed 17 Mei 2020].
- Sunyoto. Mulyo. (2020). *Perusahaan Korsel Serahkan Bantuan Alat Tes Covid-19 Untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.antaranews.com/berita/1451676/perusahaan-korsel-serahkan-bantuan-alat-tes-covid-19-untuk-indonesia>.
- The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2020. *Indonesia Successfully Passes the First UN Resolution on Global Solidarity to Overcome COVID-19*. [Online] Available at: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1160/berita/indonesia-successfully-passes-the-first-un-resolution-on-global-solidarity-to-overcome-covid-19#:~:text=%E2%80%8BNew%20York%2C%20United%20States,Nations%20Headquarters%20in%20New%20York> [Accessed 15 Juni 2020].
- UNDP, 2006. *The Human Security Framework and National Human Development Report*, New York: UNDP.
- UNESCAP, 2015. *Global Value Chains, Regional Integration and Sustainable Development: Linkages and Policy Implications. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 71st Session, 25-29 May*.

- UNGA. (2020). Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease (Covid-19). [Online] Available at <https://www.un.org/pga/74/2020/03/30/global-solidarity-to-fight-covid-19/> [Accessed 15 Juni 2020].
- UNIDO, 2019. *UNIDO Manufacturing Profile*. [Online] Available at: <https://stat.unido.org/country-profile/economics> [Accessed 10 August 2019].
- WHO. (2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus. [Online] Available at: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> [Accessed 17 Mei 2020].
- WHO. (2020). *WHO Director General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 May 2020*. [Online] Available at: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-may-2020> [Accessed 17 Mei 2020].
- Yuilyana. (2020). *Korea Selatan Berikan Bantuan Bertahap Untuk Indonesia Atasi Pandemi Corona*. [Online] Available at: <https://www.kompas.tv/article/75278/korea-selatan-berikan-bantuan-bertahap-untuk-indonesia-atasi-pandemi-corona>